

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya tahun 2019 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2019 sebagai acuan Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan tahapan demi tahapan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah dimana pemerintah dituntut untuk merubah pola manajemen pembangunan dari pelaksana menjadi fasilitator, akselesator dan pengendali pelaksanaan program pembangunan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2019 dapat dimanfaatkan sebagai bahan dokumen perencanaan serta sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pada kesempatan ini kami berharap kepada semua pihak untuk dapat mendukung program kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya. Dengan dukungan dan terjalinnya kerjasama yang baik kami harapkan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik.

Palangka Raya, Juni 2019

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA PALANGKA RAYA,**

Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 020

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	24
3.3 Program dan Kegiatan.....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V PENUTUP.....	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Tahun berjalan Kota Palangkaraya	40
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	41
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Palangka Raya	42
Tabel 2.4	Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SOPD Tahun 2019 Palangka Raya	43
Tabel 2.5	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diamanatkan menyusun Rencana Kerja SKPD yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini berisi program dan kegiatan dengan sumber dana dari APBD maupun APBN, sehingga ada konsistensi kewenangan antara tingkat pemerintahan pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di Kota Palangka Raya. Rencana Kerja SKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019.

Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2019–2024.

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2019 juga memuat evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, Program/kegiatan Prioritas Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, serta rencana kerja yang terukur yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ,Badan Ketahanan Pangan ,Kedaulatan Pangan, Kemandirian dan Ketahanan Pangan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organinsasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028);

1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD

Maksud dan tujuan Rencana Kerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Maksud

1. Mensinkronkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Nasional, Rencana Kerja SKPD dengan kebutuhan riil masyarakat Kota Palangka Raya, sehingga terjadinya sinergisitas dalam pendanaan di Kota Palangka Raya.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
3. Media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* di Kota Palangka Raya untuk menetapkan program/kegiatan pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.

b. Tujuan

1. Sebagai acuan bagi seluruh Bidang, Seksi Sub Bagian Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Mendorong terwujudnya koordinasi Program/Kegiatan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019 agar terarah sehingga pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019 dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD

Dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini terdiri dari 7 (Tujuh) BAB, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD

- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Salah satu hal yang menjadi indikasi pencapaian indikator keberhasilan pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Kota Palangka Raya, yaitu dapat diukur berdasarkan :

A. Urusan Bidang Pertanian

- a. Berkembangnya sarana dan prasarana produksi, pembenihan dan tersedianya infrastruktur pertanian
- b. Meningkatnya produksi dan produktivitas dibidang pertanian
- c. Meningkatnya Nilai Tukar Petani

B. Urusan Bidang Perkebunan

Untuk sektor perkebunan diharapkan, adanya pengawasan pada peredaran bibit / benih jenis komoditi perkebunan yang digunakan oleh perkebunan rakyat, agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat melalui usaha perkebunan.

Untuk kegiatan-kegiatan Perkebunan dalam rangka peningkatan SDM masyarakat, antara lain :

- Pelatihan Penanganan Pasca Panen Jenis Komoditi Perkebunan;
- Pembinaan Perbenihan Komoditi Perkebunan;
- Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Pada Tahun 2016, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan yang prorakyat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (Geber-MLT) seluas 30 Ha
2. Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung Program PM2L seluas 30 Ha
3. Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan untuk Masyarakat berupa bibit karet sebanyak 11.250 batang dan bibit kelapa sawit sebanyak 4.416 batang, kopi sebanyak 11.000 batang, kelapa dalam sebanyak 200 batang.
4. Pengembangan Tanaman Karet seluas 45 Ha
5. Pengembangan Tanaman Sawit seluas 70 Ha
6. Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakat seluas 80 Ha
7. Pemeliharaan Kebun Entres 2 Ha
8. Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan 20 km

Secara umum, persentase fisik kegiatan tersebut di atas mancapai 100%, karena mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya kelompok tani Untuk Tahun 2016, antusias masyarakat dalam pengembangan produktifitas sektor perkebunan mendapat dukungan penuh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya namun

tetap dilakukan pengawasan dalam pendistribusian bibit tanaman dan pengelolaan lahan, sehingga didapatkan hasil yang optimal.

C. Urusan Bidang Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan yang cukup meningkatkan kemandirian masyarakat, pemantapan ketahanan pangan dan menurunnya tingkat kerawanan pangandapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

a. Indikator kinerja ketersediaan energi

Angka Kecukupan Energi (AKE) di tingkat konsumsi untuk rata - rata Nasional anjuran sebesar 2,150 kkal/kapita/hari. Secara lengkap untuk Kota Palangka Raya tahun 2017 disajikan data sebagai berikut :

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Perhari
1.	Padi - padian	1050,6
2.	Umbi - umbian	33,9
3	Pangan hewani	347,4
4.	Minyak dan Lemak	258,2
5.	Buah / biji berminyak	23,4
6.	Kacang- kacangan	61,8
7.	Gula	104,6
8.	Sayur dan buah	112,9
9.	Lain - lain	38,3
Total		2.031,1

Dilihat dari Angka Kecukupan Energi (AKE) anjuran maka konsumsi energi perhari untuk Kota Palangka Raya masih dibawah standar.

b. Indikator kinerja Konsumsi Protein

Angka Kecukupan Protein (AKP) di tingkat Konsumsi untuk rata - rata Nasional sebesar 57 gram/kapita/hari. Secara lengkap untuk Kota Palangka Raya tahun 2017 disajikan data sebagai berikut :

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Protein Perhari
1.	Padi - padian	23,2
2.	Umbi - umbian	0,3
3	Pangan hewani	29,0
4.	Minyak dan Lemak	0,0
5.	Buah / biji berminyak	0,4
6.	Kacang- kacangan	6,5

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Protein Perhari
7.	Gula	0
8.	Sayur dan buah	3,6
9.	Lain - lain	1,4
Total		64,5

Dilihat dari Angka Kecukupan Protein (AKP) maka konsumsi protein perhari untuk Kota Palangka Raya sudah diatas anjuran.

c. Indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola pangan harapan tingkat ketersediaan Palangka Raya selama tahun 2017 mencapai 91,6. Secara lengkap kelompok bahan makanan yang menyokong pola pangan harapan tingkat ketersediaan tahun 2014 - 2016 disajikan dalam tabel berikut ini :

**Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Tahun 2013-2016
Kota Palangka Raya**

No.	Jenis Bahan Makanan	PPH 2014	PPH 2015	PPH 2016	PPH 2017
1.	Padi - padian	25	25	25	25
2.	Umbi - umbian	1,1	1,08	1,23	1,8
3.	Pangan Hewani	29	24,0	24,0	24
4.	Minyak dan lemak	4,9	4,29	4,93	4,2
5.	Buah/biji berminyak	1,0	0,075	0,08	0,1
6.	Kacang - kacangan	0,6	4,74	4,9	5,6
7.	Gula	2,5	2,5	2,5	2,5
8.	Sayur dan buah	30	29,1	27,3	30
9.	Lain - lain				
Jumlah		86,9	89,1	89,94	93,2

Untuk mencapai sasaran pola pangan harapan yang diinginkan maka kelompok bahan makanan yang perlu ditingkatkan ketersediaannya terutama adalah kelompok umbi - umbian, kacang - kacangan, sayur dan buah.

Terjadi peningkatan sebesar 4,7 dari tahun 2015 sebesar 86,9. Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi untuk Kota Palangka Raya tahun 2017 skor data disajikan sebagai berikut :

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
1.	Padi – padian	24,4
2.	Umbi – umbian	0,8
3	Pangan hewani	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5
5.	Buah / biji berminyak	0,5
6.	Kacang- kacangan	5,7
7.	Gula	2,4
8.	Sayur dan buah	26,2
9.	Lain – lain	0,0
Total		89,2

d. Indikator kinerja Penanganan Daerah Rawan Pangan di 5 kecamatan

Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Penanganan daerah rawan pangan sampai dengan tahun 2017 di Palangka Raya sudah dilaksanakan di 5 Kecamatan yang berupa analisis SKPG

e. Indikator kinerja Pengembangan Lumbung Pangan

Indikator kinerja Pengembangan Lumbung Pangan sejak tahun 2008 sampai dengan 2016, terdapat 5 (lima) gudang lumbung pangan dan 5 (lima) kelompok di wilayah Kota Palangka Raya unit Gudang Lumbung Pangan tersebut :

Unit Lumbung Pangan di Kota Palangka Raya TA. 2009 – 2017

No.	Kelurahan	DANA APBN/APBD	Keterangan
1.	Gaung Baru	APBD I Provinsi Kal-Teng TA 2009	Sudah mendapatkan barang pengisian
2.	Sei Gohong	APBN TA 2010	Sudah mendapatkan barang pengisian
3.	Kameloh Baru	APBD Provinsi Kal-Teng TA 2012	Sudah mendapatkan barang pengisian
4.	Petuk Bukit	DAK Pertanian TA 2014	Sudah mendapatkan barang pengisian
5.	Kelurahan Pager	DAK Pertanian TA 2016	Belum
Jumlah		5 (Lima)	

Adapun Sasaran percepatan diversifikasi pangan dan keamanan pangan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Indikator kinerja konsumsi energi

Dilihat dari hasil data konsumsi Energi masyarakat di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 sebesar 2.031,1 Kkal/Kapita/Hari maka konsumsi energi masih dibawah angka kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan sebesar 2.150 Kkal/Kapita/Hari.

Masih tingginya kontribusi angka kecukupan energi padi – padian salah satunya disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi oleh beras.

b. Indikator kinerja konsumsi protein

Dilihat dari hasil konsumsi protein masyarakat di Kota Palangka Raya pada Tahun 2017 sebesar 64,5 gram/kapita/hari maka konsumsi protein telah memenuhi angka kecukupan protein (AKP) yang dianjurkan sebesar 57 gram/kapita/hari.

c. Indikator kinerja pola pangan harapan

Untuk perhitungan Pola Pangan Harapan konsumsi digunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh BPS Dilihat dari Data Skor Pola Pangan Harapan tahun 2017 di Kota Palangka Raya sebesar 89,2, artinya sudah cukup baik meskipun kondisi Ideal (100). Skor Pola Pangan Harapan adalah sebagai Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan masyarakat. Semakin tinggi skor PPH maka semakin beragam konsumsi pangan masyarakat baik secara kuantitas dan kualitas maupun keragamannya dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

d. Keamanan Pangan

Keamanan pangan asal tumbuhan dilakukan dengan pengiriman sampel kacang panjang, tomat, cabe merah besar dan cabe rawit ke pusat promosi dan sertifikasi hasil pertanian di Jalan Raya Jambore No.1 Cibubur Jakarta Timur untuk diuji kadar pestisida golongan organofostat. Sampel ini diambil dari pasar kahayan. Dari Hasil pengujian tersebut tidak terdeteksi adanya kadar pestisida golongan organofosfat.

D. Urusan Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian

Untuk Bidang Penyelenggaraan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan tahun 2016 :

a. Fasilitasi peningkatan Kemampuan lembaga Petani

Kegiatan dilaksanakan pertemuan dalam rangka pengembangan kemampuan keltan sebagai wadah kelas belajar, kerja sama dan unit produksi serta pelaksanaan penilaian kemampuan keltan. Kendala pelaksanaan yaitu database / profil keltan yang masih belum akurat. Pelaksanaan penilaian kelas keltan dari belum diketahui ke pemula berjumlah 43 keltan, kelas pemula ke lanjut berjumlah 21 keltan 2 kelas lanjut ke madya berjumlah 5 keltan.

b. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis (PENAS)

Kegiatan ini memfasilitasi KTNA / Petani Kota Palangka Raya untuk mengikuti kegiatan Pekan Nasional di Aceh pada Tanggal 6 s/d 11 Mei 2017 Di Provinsi Aceh dengan jumlah peserta dari kota Palangka Raya yang bergabung dengan Provinsi Kalimantan Tengah 15orang Petani dan pendamping, 4 orang panitia pendamping serta peninjau 8 orang.

Dalam Kegiatan tersebut kontingen dari kalteng belum bisa meraih juara, hal tersebut menjadi pembelajaran untuk para petani, namun ilmu yang didapat dari kegiatan tersebut sangat banyak dan sangat bermanfaat untuk para petani dan penyuluh pendamping.

c. Fasilitasi kegiatan Pembinaan di Pos Penyuluhan

Kegiatan berupa pertemuan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran pos penyuluhan sebagai wadah untuk memecahkan masalah dan pertukaran informasi bagi petani / keltan. Untuk tahun 2017 sebanyak 4 buah Pos Penyuluhan yang di fasilitasi tidak bisa maksimal karena kekurangan dana.

d. Kegiatan Supervisi Tahun 2017 yang di supervisi adalah sebagai berikut :

Tabel Supervisi Penyuluh Tahun 2017

NO.	NAMA PENYULUH	LOKASI/TEMPAT/WILAYAH
1.	ELVI KARYANI, S.Pt	Kelurahan Pahandut dan Langkai
2.	SISWATI A.Md	Kelurahan Panarung
3.	TRIS ERNA A.Md	Kelurahan Bukit Tunggal
4.	RAUDAH, A.Md	Kelurahan Menteng
5.	AMITISIA A.Md	Kelurahan Palangka
6.	WIWIK RAHAYU,SP	Kelurahan Banturung
7.	ALFONI HENDRAWAN,S.Pt	Kelurahan Gaung Baru
8.	VERIANTO, S.Pt	Kelurahan Panjehang dan Petuk Barunai

Tidak semua penyuluh serempak bisa disupervisi setiap tahun karena dana yang tersedia tidak cukup. Untuk menyikapi hal tersebut pelaksanaan supervisi dilakukan bertahap tiap tahunnya.

e. Pendampingan Penyuluhan bagi Pertanian/Perkebunan

Hanya dilaksanakan Pertemuan Rutin sebanyak 2 Triwulan selanjutnya tidak ada pertemuan rutin penyuluh.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra dapat dilihat pada Tabel Lampiran Renja

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

➤ Urusan Bidang Pertanian

Berupa Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja Pelayanan SKPD DIGUNAKAN BEBERAPA Indikator , antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan /atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Indikator merupakan ukuran pencapaian kinerja yang telah Dilaksanakan Keberhasilan pembangunan pertanian di Kota Palangka Raya dapat diukur dan di analisa dengan beberapa indikator.

Salah satu hal yang menjadi indikasi pencapaian indikator keberhasilan pembangunan pertanian di Kota Palangka Raya, yaitu dapat diukur berdasarkan :

- a. Berkembangnya sarana dan prasarana produksi pembenihan dan tersedianya infrastruktur pertanian
- b. Meningkatnya produksi dan produktivitas di Bidang Pertanian
- c. Meningkatnya Nilai Tukar Petani
- d. Pada Bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

➤ Urusan Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan Kota Palangka Raya memiliki tugas pokok *melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan secara terpadu bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku*. Berkenaan mengenai kinerja pelayanan, bidang ini tidak termasuk ke dalam instansi yang melakukan pelayanan umum atau badan layanan umum (BLU), sehingga dalam penilaian kinerja pelayanan mengalami sedikit kesulitan, selain itu untuk rumusan standar pelayanan minimal (SPM) juga belum tersedia. Untuk mengatasinya, maka digunakan indikator pada rumusan Renstra dinas Tahun 2009-2013

dan indikator kinerja kunci (IKK) sesuai PP Nomor 38 Tahun 2008 yang dikompilasikan antara dua kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian (Perkebunan).

➤ **Urusan Bidang Ketahanan Pangan**

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK), sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan ketahanan pangan, digunakan IKK dan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.

➤ **Urusan Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian**

Faktor utama untuk meningkatkan produksi disektor pertanian dan diperlukan prasarana, dan sarana pertanian yang baik dan mantap serta mempunyai teknologi yang tinggi dengan pemanfaatan yang produktif, efektif dan efisien, maka oleh sebab itu inovasi dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian harus selalu ditingkatkan.

Disamping faktor utama di sektor-sektor utama lainnya yaitu menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian berdasarkan undang – undang RI nomor 16 tahun 2006. Sarana dan prasarana penyuluhan harus memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal berdasarkan permentan nomor 51/PERMENTAN/OT.140/12/2009 sehingga Kota Palangka Raya diharapkan produksi hasil pertanian dengan lebih optimal.

➤ **Urusan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Indikator merupakan ukuran pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya bidang peternakan. Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan bidang peternakan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek penilaian tingkat capaian kinerja dengan sasaran target sesuai Renstra SKPD serta menetapkan indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya khususnya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Ijin Usaha Peternakan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya memfasilitasi para peternak dengan memberikan rekomendasi ijin usaha yang ditujukan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu agar selanjutnya dapat diproses di tingkat pemerintah Kota Palangka Raya
2. Pelayanan Ijin Pematangan Hewan:
memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi ijin pematangan hewan/ternak
3. Pelayanan Rekomendasi Kredit
memfasilitasi para peternak dengan memberikan rekomendasi ke Bank/BUMN Pelaksanaan/Kredit Program dengan total pelayanan rekomendasi kredit
4. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan
menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berfungsi sebagai salah satu persyaratan administratif pengiriman hewan ternak antar wilayah.
5. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
6. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
7. Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pemeriksaan kebuntingan
8. Pemeriksaan Gangguan Reproduksi
9. Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	
1	Produksi Tanaman Pertanian (ton)							
	1. Padi	124	130	8	4,6	6,45	3,54	
	2. Sayuran	9.325	9.435	756	9.264	8,10	98,19	
	3. Buah-buahan	6.010	6.035	5.231	8.095	87,04	134,13	
	4. Karet	2.900,25	2.900,25	2.900,25	2.967,64	100,00	102,32	
2	5. Kelapa Sawit	211,0	211	528,68	1.018,69	250,56	482,79	
	Produktivitas Hasil Pertanian (ton/ha)							
	1. Padi	2,08	2,08	2	2,90	96,15	139,42	
	2. Sayuran	1,98	1,98	419	1.540,64	21.118,95	77.810,10	
	3. Buah-buahan	3,457	3	16,26	37,92	470,35	1.096,59	

	4. Karet	2.173,71	2.173,71	3.040,11	3.040,85	139,86	139,89
	5. Kelapa Sawit	1.683,14	1.683,14	4.782,10	8.079,29	284,12	480,01
NO.	INDIKATOR KINERJA						
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
3	Peningkatan Produksi Peternakan I. Populasi Ternak (ekor)						
	1. Sapi	2.105	2.210	1.958	2.036	93,02	92,13
	2. Kerbau	43	44	12	34	27,91	77,27
	3. Kambing	3.553	3.730	1.247	1.372	35,10	36,78
	4. Babi	19.619	21.189	18.368	21.189	93,62	100,00
	5. Ayam Buras	244.562	256.790	56.403	87.698	23,06	34,15
	6. Ayam Broiler	1.637.977	1.801.757	1.640.377	1.801.775	100,15	100,00
	7. Ayam Ras Layer	80.000	100.000	110.500	150.000	138,13	150,00
	8. Itik	5.576	6.141	5.851	65.141	104,93	1.060,76
NO.	INDIKATOR KINERJA						
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
	II. Produksi Produk Asal Ternak (ton)						
	1. Daging Sapi	1.401.450	1.540.050	1.021.104	1.102.248	72,86	71,57
	2. Daging Kerbau	19.500	21.450	7.560	8.400	38,77	39,16
	3. Daging Kambing	25.656	28.224	42.044	45,66	163,88	0,16
	4. Daging Babi	320.700	352.800	331.088	338	103,24	0,10
	5. Daging Ayam Buras	620.183	682.201	401.176	446,12	64,69	0,07
	6. Daging Ayam Broiler	5.905.083	6.495.591	5.789.520	5.373,04	98,04	0,08
	7. Daging Itik	49.726	54.699	37.340	39,50	75,09	0,07
	8. Telur Ayam Ras	597.372	609.319	2.016.625	1.884.818	337,58	309,33
	9. Telur Ayam Buras	382.444	388.181	162.731	170.806	42,55	44,00
	10. Telur Itik	24.620	24.989	34.932	36.612	141,88	146,51
4	Nilai Tukar Petani	112	115	97,60	97,89	87,14	85,12
5	Skor PPH	87	90	89,20	90,60	102,53	100,67

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

➤ **Urusan Bidang Pertanian**

1. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur pertanian
2. Peningkatan penerapan teknologi spesifik local dan system pertanian berbasis konservasi
3. Pengembangan kelembagaan pertanian pengembangan kapasitas SDM di bidang pertanian

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur pertanian
- b. Terbatasnya penerapan teknologi spesifik lokal dan sistem pertanian berbasis konservasi.
- c. Masih lemahnya kelembagaan pertanian
- d. Perlunya pengembangan kapasitas SDM di bidang Pertanian

➤ **Urusan Bidang Perkebunan**

Bidang Perkebunan Kota Palangka Raya merupakan memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan secara terpadu bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pelayanan yang dilakukan oleh dinas bukan termasuk pada pelayanan umum, namun tetap memberikan pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya, seperti penyediaan bibit perkebunan dan fasilitasi perijinan usaha sektor perkebunan di tingkat Kab/Kota. Secara umum kinerja pelayanan oleh bidang dapat dikatakan cukup baik terlepas dari permasalahan yang sifatnya teknis, misalnya tinjauan mengenai pelepasan kawasan karena sampai saat ini RTRWP Kalimantan Tengah belum disahkan, maka kewenangan dinas cukup terbatas hanya pada klarifikasi diatas peta saja dan bukan penetapan. Selain itu untuk Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi bidang Perkebunan sampai dengan saat ini, masih berpatokan pada kompilasi dua instansi Kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dan Pertanian, jadi belum ada SPM khusus yang diformulakan sebagai acuan. Kedepannya, semoga SPM dinas dapat disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Analisis terhadap kondisi yang dialami saat ini menunjukkan bahwa beberapa kelompok permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas pembangunan perkebunan, dapat di kelompokkan menjadi :

1. Penataan, pengelolaan aneka fungsi kebun
RTRWP belum disyahkan sehingga pedoman dalam penataan kawasan belum dapat dilaksanakan
2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berkualitas khususnya bidang perkebunan masih terbatas, baik secara kuantitatif maupun pendistribusiannya belum proporsional sesuai beban tugas dan tanggungjawab.

3. Penegakan hukum.
 - a. Ketersediaan dan distribusi Peraturan Perundang-undangan di perkebunan masih terbatas
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan beberapa program pembangunan perkebunan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Adapun Permasalahan dan hambatan tersebut tentunya memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan dinas, diantaranya :

1. Kesulitan dalam penentuan lokasi/areal kerja kegiatan.
2. Penyelesaian tugas dilapangan terhambat.
3. Terbatasnya kewenangan dinas dalam penanganan permasalahan.
4. Kepedulian masyarakat pada aturan perkebunan sangat kurang.
5. Peran serta masyarakat/pekebun dalam mengelola usahanya belum optimal.
6. Kondisi lahan yang marginal menyebabkan kurang berkembangnya investasi di bidang perkebunan.

➤ **Urusan Bidang ketahanan Pangan**

Proses ketahanan pangan tentunya memerlukan pemikiran sinergis dan terarah yang mengacu pada arah pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya, guna membenahi sekaligus menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi untuk dicarikan solusinya. Oleh Karena itu pada pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah berdampak positif terhadap perubahan kondisi ke arah yang lebih baik sekaligus mengarah pada upaya mentransformasikan hambatan menjadi potensi dan ancaman menjadi peluang dalam isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Urusan Bidang Ketahanan Pangan antara lain :

1. Mendorong penyediaan produk pangan yang beranekaragam, khususnya yang berasal dari bahan-bahan pangan lokal dan memanfaatkan potensi industri pengolahan pangan domestik yang maju.
2. Penyediaan stok pangan khususnya untuk mencukupi produksi daerah (nasional) yang masih defisit.
3. Kelembagaan ketahanan pangan yang mantap berbasis manajemen modern.
4. Sistem distribusi yang efisien
5. Stabilitas Harga pangan
6. Perlindungan dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga.
7. Tersajinya data konsumsi pangan secara periodik dan berkelanjutan

8. Dukungan sosialisai promosi dan advokasi dalam penganeekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media
9. Tersedianya informasi berbasis pangan lokal
10. Penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang
11. SDM yang sehat dan sejahtera
12. Penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Pada umumnya kualitas ketahanan pangan mengalami peningkatan, namun seiring dengan perkembangannya disamping beberapa keberhasilan aplikasi program dan kegiatan pada masa sebelumnya, masih dihadapi beberapa permasalahan strategis yang berpengaruh signifikan terhadap optimalitas penyelenggaraannya, yaitu :

1. Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya.
2. Terbatasnya kapasitas produksi, penurunan kapasitas kelembagaan petani serta penurunan kualitas penyuluhan
3. Kemampuan nasional untuk mengimpor bahan pangan mulai dari kedelai, gandum, gula, susu menjadi terbatas.
4. Keberadaan dan fungsi lembaga ketahanan pangan masyarakat dalam bentuk lumbung pangan yang sudah lama dikenal di kalangan penduduk pedesaan sudah mulai memudar
5. Pengelolaan cadangan pangan yang tidak merata
6. Kemampuan mengelola kelancaran distribusi belum optimal
7. Aspek sarana dan prasarana belum optimal
8. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan
9. Pengaruh perdagangan pangan internasional sudah tidak dapat diabaikan lagi
10. Pada banyak daerah kepedulian dan kemampuan mengelola kelancaran distribusi belum optimal
11. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pangan penduduk dilihat dari pola konsumsi pangan masyarakat
12. Konsumsi beras per kapita masih sangat tinggi
13. Keterbatasan kemampuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi
14. Keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat
15. Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan
16. Pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan import.

17. Perlunya penyediaan pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Sedangkan langkah langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

1. Koordinasi intensif dengan dinas/instansi terkait penataan ruang yang dapat menghambat proses pencapaian revitalisasi ketahanan pangan
2. pemanfaatan lahan usaha melalui intensifikasi ketahanan pangan
3. Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok tani yang belum memenuhi standar persyaratan legalitas formal kelas kemampuan kelompok;
4. koordinasi pembinaan bersama dengan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa melalui rapat minggon dan forum koordinasi lainnya

➤ **Urusan Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Adapun beberapa permasalahan strategis yang dihadapi pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian yaitu sebagai berikut :

- a. Terbatasnya prasarana dan sarana pertanian
- b. Terbatasnya kemampuan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Petugas
- c. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pertanian
- d. Terbatasnya minat pelaku utama generasi muda yang berusaha dibidang pertanian
- e. Lemahnya kelembagaan petani
- f. Terbatasnya rekomendasi teknologi pertanian untuk lahan Kota Palangka Raya

➤ **Urusan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Pada sub sektor peternakan, masalah pokok yang dihadapi adalah soal pengendalian penyakit terutama bersifat zoonosis, ketersediaan bibit unggul bersertifikat dan penerapan teknologi hal lain yang mendapat perhatian yaitu sumber daya manusia jaminan mutu dan keamanan produk masih tingginya pemotongan hewan ternak betina produktif, pengembangan kawasan, fluktuasi harga produk peternakan dan ketersediaan pakan ternak berkualitas terkait dengan menyempitnya lahan peternakan akibat alih fungsi lahan yang mengakibatkan fungsi kawasan peternak dan zona peternakan yang tidak memperhatikan faktor lahan dan kultur budaya masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat beberapa isu – isu strategis bidang peternakan dan kesehatan hewan yaitu sebagai berikut :

- a. Keterbatasan jumlah SDM aparatur khususnya petugas teknis peternakan dan tenaga pelayanan kesehatan hewan di tingkat kecamatan
- b. Penguasaan dan penerapan teknologi dalam budidaya peternakan di tingkat peternak
- c. Perkembangan daya saing usaha peternakan yang cukup tinggi;

- d. Terbukanya pangsa pasar untuk produk asal ternak baik segar maupun olahan;
- e. Adanya daerah endemik penyakit hewan menular/zoonosis antara lain: penyakit rabies (anjing,kucing,kera), avian influenza (unggas), brucellosis dan anthrax (ternak sapi/kerbau/kambing). kurangnya sistem pengawasan lalulintas ternak dan surveilans berpotensi terhadap mutasi/penyebaran penyakit hewan menular strategis (zoonosis) serta masuknya penyakit dari luar (eksotik). Pada daerah endemik masih terjadi penularan penyakit zoonosis secara **sporadis** yang dapat menjadi ancaman dan dampak sangat fatal terhadap sektor peternakan, karena penularan penyakit zoonosis dapat menyebabkan kematian pada populasi ternak. Penyakit hewan menular zoonosis dapat menular pada hewan/ternak dan manusia, sehingga selain merugikan para peternak/usaha peternakan juga dapat mengganggu ketentraman, kenyamanan dalam berusaha dan perdagangan ternak.
- f. Rendahnya suplai ternak sapi dalam daerah untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Kota Palangka Raya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya dan perkembangannya fasilitas hotel, reustoran, rumah makan serta pusat-pusat kuliner, maka berpengaruh signifikan terhadap tingkat permintaan komsumsi daging sapi. Tingkat populasi dan produksi ternak sapi tidak sebanding dengan laju jumlah pemotongan ternak sapi dan semakin terbatasnya areal pertanian/peternakan, maka pasokan bahan baku sapi potong akan semakin sulit didapatkan. Untuk mencukupi permintaan daging sapi, maka kebutuhan bahan baku ternak sapi potong sebagian besar di pasok dari luar daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 (dapat di lihat pada Lampiran).

2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya, menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

Organisasi Perangkat Daerah yang langsung ditujukan, berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
3. Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
4. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD kabupaten/kota;
5. Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; dan
6. Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.
7. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pertanian, tidak lepas dari keterpaduan aparatur pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang bersinergi dalam rangka pelaksanaannya. Setiap komponen secara garis besar tertuang dalam dokumen perencanaan yang mengacu pada visi dan misi pemerintah pusat. Hal tersebut juga menjadi dasar serta arah pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan Kota Palangka Raya.

Visi Kementerian Pertanian 2015 - 2019

Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Makna dari Visi adalah :

- Kedaulatan pangan merupakan hak Negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan system pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.
- Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai actor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan dilahan usaha yang digelutinya.

Misi Kementerian Pertanian 2015 - 2019

1. Mewujudkan ketahanan Pangan dan Gizi
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
3. Mewujudkan Kesejahteraan Petani
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi.

Makna dari misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan.
2. Meningkatkan Nilai Tambah Daya Saing Komoditas Pertanian adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Dari hasil telaahan capaian kinerja, masih ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan, yaitu:

1. Masih lemahnya kelembagaan dan permodalan usaha pertanian dalam arti luas;
2. Masih lemahnya kapasitas SDM di bidang pertanian dalam usaha untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
3. Belum optimalnya nilai tambah hasil pertanian, khususnya untuk produk unggulan daerah.
4. Terbatasnya SDM berbasis pertanian

Beberapa faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan, yaitu:

1. Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi pertanian dalam arti luas, akibat pertambahan jumlah penduduk;
2. Tumbuhnya permintaan produk pangan organik di seluruh dunia sebagai akibat dari adanya tren baru masyarakat dunia yaitu gaya hidup sehat dengan slogan "Back to Nature".
3. Tumbuh dan berkembangnya agroindustri di tingkat lokal, regional maupun nasional
4. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.
5. Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerja sama seluruh pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan pertanian
6. Masih terbuka potensi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

Penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pelaksanaan perkebunan melalui Rencana Kerja (Renja) Pembangunan pertanian, tidak lepas dari keterpaduan aparatur pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang bersinergi dalam rangka pelaksanaannya. Setiap komponen secara garis besar tertuang dalam dokumen perencanaan yang mengacu pada visi dan misi pemerintah pusat. Hal tersebut juga menjadi dasar serta arah pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan Kota Palangka Raya.

Perkebunan Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan di wilayah Kota Palangka Raya berpedoman pada tugas pokok Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang dan perkebunan secara terpadu bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya memiliki fungsi-fungsi yaitu untuk :

1. Merumuskan kebijakan di bidang perkebunan sesuai dengan kebijakan Walikota dan peraturan yang berlaku;

2. Menyelenggarakan penataan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan perkebunan
3. Melaksanakan pengembangan usaha di bidang perkebunan
4. Menyelenggarakan pemberian perizinan usaha perkebunan;
5. Menyelenggarakan pembinaan perkebunan;
6. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dinas.

Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen *Millenium Depeloment Goals* (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi *World Food Summit* (WFS) 1996, untuk mengurangi penduduk dunia yang menderita lapar dan malnutrisi hingga setengahnya pada tahun 2018.

Aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi menuju kemandirian pangan; mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Aspek peningkatan system distribusi harga pangan diarahkan untuk mengembangkan sistm distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan; meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

Pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk mempercepat panganekaragaman konsumsi pangan berbasis local; mengembangkan teknologi pengolahan pangan terutama pangan lokal guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial; mengembangkan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan.

Implementasikan kebijakan-kebijakan tersebut diperlukan langkah sebagai berikut : peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; peningkatan kerjasama internasional; peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, serta mendorong terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Langkah operasional untuk penetapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan yaitu : mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategi (beras, jagung, kedelai, gula daging sapi); meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal wilayah; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan; pemberdayaan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan;

penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) melalui Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG) untuk penanganan kerawanan pangan kronis dan transien.

Sedangkan langkah operasional untuk pemantapan system distribusi pangan yang efisien dan efektif adalah mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah dan cadangan pangan masyarakat; mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra produksi; menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode khusus/tertentu; pemantauan harga pangan pada hari besar keagamaan.

Berikutnya langkah operasional untuk pembinaan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang pada masyarakat adalah sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi, berimbang (3B), sehat dan halal; optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan oleh kelompok wanita tani/dasawisma; mendorong pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Mikro) industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu); lakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat.

Adapun langkah operasional dalam rangka pembinaan keamanan pangan segar adalah koordinasi sosialisasi pembinaan keamanan pangan segar di tingkat petani dan konsumen; pengawasan keamanan pangan segar di tingkat usahatani dan pasar; peningkatan kemampuan kelembagaan dan aparat daerah dalam penanganan keamanan pangan segar.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2019

➤ Urusan Bidang Pertanian

Tujuan dari pembangunan pertanian di Kota Palangka Raya yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pangan dan Hortikultura.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian.
3. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani.

Adapun Sasaran pembangunan pertanian di Kota Palangka Raya yaitu “Swasembada Tanaman Pangan dan Hortikultura khusus Komoditas Sayur-sayuran”.

➤ Urusan Bidang Perkebunan

1. Untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara lestari.

Tujuan : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam rangka menjamin kesejahteraan hidupnya melalui usaha di sektor perkebunan.

Sasaran : Terlaksananya pelatihan/sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat serta pemantapan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengelolaann sumber daya alam yang lestari

2. Peningkatan pemanfaatan lahan yang potensial untuk usaha perkebunan.

Tujuan : meningkatkan produktifitas lahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha di sektor perkebunan.

Sasaran : terlaksananya pengembangan usaha sektor perkebunan oleh masyarakat melalui pemberian bantuan bibit tanaman, perlengkapan kerja dan pemeliharaan kebun serta fasilitasi investasi sektor perkebunan.

➤ **Urusan Bidang Ketahanan Pangan**

Tujuan dari pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM dalam Menganalisis dan Menyusun Bahan Kebijakan Pengembangan Ketersediaan Pangan.
2. Mengembangkan sistem koordinasi antar lembaga untuk menyelaraskan upaya pengembangan ketahanan pangan
3. Memfasilitasi masyarakat untuk berperan serta dalam mewujudkan ketersediaan dan cadangan pangan yang bertumpu pada sumber daya lokal.

Sasaran dari Program Ketahanan Pangan di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Makro
 - a. Ketersediaan energi 2663 kkal/kap./hari dan protein 87,84 gram/kap/hari.
 - b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 88 kkal/kapita/hari.
 - c. Menurunkan jumlah penduduk miskin Kota Palangka Raya 1 (satu) % pertahun, sesuai Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2006.
 - d. Meningkatkan produksi pangan sehingga tidak terjadi rawan pangan.
2. Sasaran Mikro
 - a. Pengembangan desa mandiri pangan sebanyak 6 Kelurahan inti, dan 3 Kelurahan Replikasi
 - b. Penanganan kerawanan pangan di 5 kecamatan berupa analisis SKPG dan bantuan sosial
 - c. Neraca bahan makanan dan PPH Ketersediaan Pangan 1 kegiatan.
 - d. Percepatan diversifikasi konsumsi pangan sebanyak 1 kegiatan
 - e. Analisis pola konsumsi pangan sebanyak 1 kegiatan
 - f. Pengembangan lahan pekarangan sebanyak 1 kegiatan
 - g. Keamanan dan mutu pangan sebanyak 1 kegiatan

➤ **Urusan Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian**

1. Adanya tujuan dan sasaran prasarana pertanian yaitu :

Tujuan :

Pengembangan prasarana pertanian

Sasaran :

Lahan kelompok tani, masyarakat dan pemerintah

2. Tujuan dan sasaran sarana pertanian yaitu :

Tujuan :

Peningkatan pengawasan penggunaan sarana pertanian

Sasaran :

Pengawasan di kios – kios pengecer penjual sarana pertanian

3. Tujuan dan sasaran penyuluh pertanian yaitu :

Tujuan :

Pengembangan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera

Sasaran :

Peningkatan SDM Pelaku Utama

➤ **Urusan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Tujuan:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas bibit

Meningkatkan potensi kualitas dan kuantitas bibit ternak (sapi, kerbau, kambing, babi, ayam buras, itik) melalui penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan Good Breeding Practices, peningkatan penerapan teknologi mutu genetik bibit ternak, peningkatan penerapan teknologi perbibitan, teknologi pakan ternak, pengembangan hijauan pakan ternak (HPT) dan pengembangan usaha/investasi.

2. Peningkatan populasi, produksi ternak dan hasil ternak serta konsumsi protein hewani

Meningkatkan populasi dan produksi ternak ruminansia, khusus ternak sapi potong/kerbau melalui Inseminasi buatan dan UPSUS SIWAB, pengembangan dan penangkaran rusa serta pemenuhan gizi/protein hewani

3. Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal.

Meningkatkan populasi dan produksi serta pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia melalui pertumbuhan populasi dan produksi ayam buras dan itik, proporsi produksi telur ayam (unggas), proporsi produksi daging unggas lokal terhadap total produksi daging unggas, serta proporsi pemanfaatan bahan pakan lokal dalam pakan unggas.

4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis.

Melakukan penguatan kelembagaan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis, perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik, serta terjaminnya mutu obat hewan.

5. Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan.

Melakukan penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner, peningkatan jaminan produk hewan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan daya saing produk hewan, tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan tersedianya profil keamanan produk hewan nasional serta peta zoonosis, serta peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU.

6. Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen adalah meningkatkan pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat.

Sasaran

1. Meningkatnya populasi ternak, produksi dan produktivitas ternak/hasil ternak
2. Perlindungan dan penjaminan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang memenuhi standar Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)
3. Swasembada daging khususnya daging sapi
4. Pembebasan penyakit hewan menular/zoonosis (PHMZ)
5. Meningkatnya pendapatan peternak

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Program unggulan sebagai prioritas pembangunan merupakan penjabaran strategis dari Visi dan Misi pembangunan Kota Palangka Raya. Secara garis besar, untuk melaksanakan Visi dan Misi, maka disusun program unggulan yang sumber dananya bersumber dari APBD dan DAK Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
- b. Pelatihan Penanganan pasca Panen Tanaman Karet

2. Program Program peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

- a. Pengembangan Sistem Informasi Pasar
- b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Database Statistik Pertanian Kota Palangka Raya.
- c. Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Temu Teknis Usaha di Bidang Perkebunan.

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.

- a. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.
- b. Informasi Pasar

- c. Promosi Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
 - d. Peningkatan Keterampilan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Hortikultura
 - e. Bantuan Modal Usaha untuk Gapoktan
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
 - b. Pengelolaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
 - c. Penguatan Kelembagaan UPT BBPP Tangkiling
 - d. Pengembangan tanaman Cabe Merah dan Bawang Merah Ramah Lingkungan
 - e. Perbanyak Bibit Tanaman Hortikultura
 - f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
 - g. Bantuan bibit Tanaman Perkebunan untuk Masyarakat
 - h. Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakat
 - i. Pembinaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi
 - j. Peningkatan SDM Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 5. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan
 - a. Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan/Perikanan
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
 - c. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluh
 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - a. Penanggulangan Rabies
 - b. Surveillance Avian Influenza
 - c. Pengawasan Produk Asal Ternak
 - d. Pengadaan Saprasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 - a. Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Produksi Peternakan
 8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - a. Pengadaan dan Pendistribusian sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
 9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - a. Hari Pangan Sedunia (Tk. Provinsi dan Nasional)
 - b. Pameran dan Promosi Dalam dan Luar Daerah
 - c. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan
 - d. Pendampingan P2KP
 - e. Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan
 - f. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - g. Pemantauan Harga Pangan Pokok Daerah
 - h. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - i. Pengembangan Diversifikasi Tanaman/Pangan

- j. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- k. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
- 10. Program Perlindungan Kebun dan Tanaman
 - a. Pemantauan Kebakaran/Gangguan Lahan dan Kebun serta HPT
- 11. Program Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan
 - a. Pemeliharaan Kebun Entres dan Pembibitan Karet
- 12. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - a. Penyuluhan Pengolahan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat
 - b. Pengembangan Pakan Ternak
 - c. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
 - e. Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan
 - f. Inventarisasi dan Pengawasan Usaha Sarang Burung Walet
 - g. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-RPH

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam rangka pelayanan pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan di Kota Palangka Raya, bila ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah, antara lain :

- a. Belum tertatanya kawasan pengembangan yang telah disesuaikan dengan tata ruang wilayah, dikarenakan belum terbitnya Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terkini, mengharuskan arahan fungsi kawasan tetap mengacu kepada Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), sehingga belum adanya kawasan yang terintegrasi secara spesifik dan terpadu untuk pengembangan kawasan.
- b. Belum optimalnya pengembangan kawasan yang memiliki potensi untuk komoditi spesifik, sehingga masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas suatu kawasan
- c. Perlu adanya perlakuan khusus dalam pengembangan suatu kawasan yang ideal untuk pertanian yang disebabkan oleh factor kondisi lahan yang belum optimal dan marginal contohnya lahan gambut, lahan kritis dan lahan terlantar.
- d. Belum padunya tata ruang wilayah untuk pengembangan pembangunan pertanian, sehingga menimbulkan konflik dimasyarakat disebabkan tidak jelasnya batas-batas kawasan, baik kawasan perkebunan, pertambangan dan pertanian rakyat.
- e. Mempertimbangkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Palangka Raya terdiri atas lahan gambut, maka alokasi ruang untuk pertanian, perikanan dan peternakan harus dilakukan secara hati-hati karena aktivitas pembukaan lahan gambut akan meningkatkan emisi karbon dan pada saat bersamaan mengurangi fungsi areal gambut sebagai tempat penampungan air hujan (*Water retention*), apabila hal ini terjadi akan mengakibatkan bencana banjir.

Beberapa faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan, yaitu

- a. Regulasi yang mengatur tata ruang wilayah, sehingga adanya tata ruang yang terpadu dan serasi
- b. Pelaksanaan program-program terpadu di Kota Palangka Raya
- c. Pengembangan kawasan yang terintegrasi agropolitan, P2IUSP (Penembangan Pembibitan dan Inkubator Usaha Sapi Potong) dan minapolitan menjadi kawasan yang produktif dan ekonomis.
- d. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian.

Kegiatan bidang Ketahanan Pangan yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah pembangunan lumbung pangan. Pembangunan lumbung pangan ini bertujuan untuk menampung beras dan bahan produk lainnya pada musim-musim tertentu dan disalurkan pada saat rawan pangan.

Pembangunan lumbung pangan masyarakat dibangun di wilayah/daerah rawan pangan. Oleh karena itu lumbung pangan dibangun (lokasi) pada daerah pemukiman sesuai dengan tata ruang wilayah kecamatan/desa. Target pembangunan lumbung pangan sebanyak 5 lumbung pangan masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2014 s/d 2018. Penentuan lokasi lumbung dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Membuka surat/mengirim surat ke kecamatan (camat) sebagai calon lokasi lumbung, di mana isi surat dimaksud agar pihak pemerintah kecamatan dapat memberikan gambaran dimana/lokasi lumbung pangan dibangun.
2. Dari pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya menugaskan staf untuk turun langsung ke lapangan dalam rangka menghimpun informasi dari semua pihak terkait sehubungan dengan akan dibangun lumbung pangan masyarakat desa di wilayah ini. Hal ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat.

Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut sehingga apabila dibangun lumbung pangan masyarakat tidak bersentuhan dengan kawasan hutan lindung. Dalam hal ini berdirinya bangunan lumbung berdiri di atas lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan kawasan yang menempatkan pertanian sebagai penggerak perekonomian. Lahan, perairan umum, potensi tenaga kerja, dan basis ekonomi lokal menjadi faktor utama pengembangan pertanian. Saat ini disadari bahwa pembangunan pertanian tidak saja bertumpu di satu kawasan tetapi juga diperlukan integrasi dengan kawasan dan dukungan sarana serta prasarana yang memadai. Struktur perekonomian wilayah merupakan faktor dasar yang membedakan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, perbedaan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi dan potensi suatu wilayah dari segi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan kelembagaan.

Berangkat dari kondisi tersebut perlu disusun sebuah kerangka dasar pembangunan pertanian yang kokoh dan tangguh, artinya pembangunan yang dilakukan harus didukung oleh segenap komponen secara dinamis, ulet, dan mampu mengoptimalkan sumberdaya, modal, tenaga, serta teknologi sekaligus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian harus berdasarkan asas 'keberlanjutan' yakni, mencakup aspek ekologis, sosial dan ekonomi.

Konsep pertanian yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan perencanaan wilayah yang berbasis sumberdaya alam yang ada di suatu wilayah tertentu. Konsep perencanaan mempunyai arti penting dalam pembangunan daerah karena perencanaan merupakan suatu proses persiapan secara sistematis dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan yang mencakup siapa dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki agar pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara umum bahwa sumber daya pertanian adalah potensi yang strategis untuk wilayah Kota Palangka Raya dan memiliki peranan yang sangat besar bagi perkembangan daerah Kota Palangka Raya, yang diindikasikan sektor pertanian dalam memberikan peranan dalam pembangunan daerah dan perekonomian yang harapannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk, sebagai sumber pendapatan, sebagai sarana untuk berusaha, serta sebagai sarana untuk dapat merubah nasib ke arah yang lebih baik lagi. Peranan pertanian/agribisnis tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi petani dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Kota Palangka Raya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, yaitu yang ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan SKPD, maka dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya produksi dan produktivitas mutu perkebunan.
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana produksi perkebunan.
3. Masih lemahnya kelembagaan dan sumberdaya petani.
4. Perlindungan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Selanjutnya ditentukan juga isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi bidang Perkebunan Kota Palangka Raya dari faktor-faktor eksternal lainnya, seperti terlihat pada tabel 3.5.

Isu-isu strategis dalam pembangunan Pertanian di Kota Palangka Raya, antara lain sebagai berikut :

- a. Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian,.
- b. Peningkatan penerapan teknologi spesifik local.
- c. Pengembangan kelembagaan pertanian.
- d. Pengembangan kapasitas SDM di bidang Pertanian, .
- e. Penyediaan pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- f. Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan, produksi dan pasca panen di bidang pertanian.
- g. Ketidakmerataan kesejahteraan dikarenakan pertanian kurang mendapatkan perhatian untuk investasi.
- h. Kurang adanya keterkaitan antara sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya di masa datang suatu kondisi /kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dalam Peternakan di Kota Palangka Raya, antara lain sebagai berikut :

1. Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur peternakan
2. Peningkatan penerapan teknologi spesifik local dan sistem pertanian berbasis konservasi.
3. Pengembangan kelembagaan peternakan.
4. Pengembangan kapasitas SDM di bidang peternakan
5. Penularan dan penyebaran penyakit hewan strategis/eksotik
6. Penyediaan pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
7. Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan, produksi dan pasca panen di bidang peternakan.

Adapun isu-isu strategis pada bidang, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

A. Strategis yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang antara lain dengan :

- a. Mengsinkronkan dan mengintegrasikan program kegiatan ketahanan pangan yang meliputi sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dalam rangka mendukung percepatan penganekaragaman pangan.
- b. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pangan berbasis potensi pangan lokal.
- c. Mengembangkan kelembagaan Ketahanan Pangan dan peningkatan sumber daya aparatur dalam upaya pembinaan kepada petani/peserta pada desa mandiri pangan.
- d. Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan berbasis potensi lokal.

B. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman antara lain dengan:

1. Meningkatkan pemberdayaan aparatur ketahanan pangan baik secara kuantitas maupun kualitas, gabungan kelompok tani, kelompok tani sebagai kemitraan pelaksanaan P-LDPM dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bertumpu pada sumber daya lokal.
2. Meningkatkan fasilitasi petugas ketahanan pangan dalam sosialisasi pola konsumsi pangan yang memenuhi azas 3B dan aman, terutama yang berbasis potensi lokal.
3. Menjaga stabilitas harga pangan.
4. Strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang antara lain :
5. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan ketahanan pangan dan operator.

6. Meningkatkan sumberdaya aparatur guna mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga berbasis pangan lokal.
7. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dan pihak swasta dalam integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang konsumsi dan panganekaragaman pangan.
8. Memfasilitasi permodalan petani.
9. Mendorong terwujudnya kemandirian pangan masyarakat.

C. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman antara lain dengan :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian penghasil pangan olahan dan pangan alternatif.
2. Memanfaatkan media informasi untuk mendukung ketahananpangan masyarakat melalui produk pangan dalam negeri/pangan lokal.
3. Melakukan kampanye dan promosi tentang pola konsumsi dan diversifikasi pangan secara terus menerus melalui berbagai media.
4. Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.
5. Membangun cadangan pangan masyarakat.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Setidaknya ada tiga isu strategis yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu :

1. Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap individu;
2. Pangan merupakan basis bagi pengembangan sumberdaya manusia berkualitas, baik dalam arti biologis maupun intelektual;
3. Pemantapan kebutuhan pangan merupakan basis pembangunan ekonomi, dan kebutuhan nasional bagi suatu negara yang berdaulat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2019 yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perlu dilakukan identifikasi sumber-sumber dana untuk melaksanakan program/kegiatan, baik pada tahun rencana maupun prakiraan maju. Kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi.

Agar diperoleh hasil yang lebih baik, terlebih dahulu dilakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam hal ini terfokus pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

1. Identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Bandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Sajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;
 - b. Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat

- perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra skpd, serta ketersediaan sumber dana lainnya
- c. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda) yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, lakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
 - b. Teliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
 - c. Teliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
 - d. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
 8. Rumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
 9. Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Untuk Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2018 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2019, dapat dilihat pada lampiran renja ini tabel 1.

Penyajian Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018, SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya terdiri dari 13 program dan 48 kegiatan. Adapun pendukung dan penunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memerlukan sumber dana yang berasal dari APBD dan DAK. Sumber Dana yang direncanakan pada tahun Anggaran 2018 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- a. Sumber dana dari APBD tahun Anggaran 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar : Rp. 18.232.237.838,39,-
dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 8.358.227.013,39,-
- Belanja Langsung sebesar : Rp. 9.874.010.825,00,-

Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan pembangunan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan

keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018 memuat evaluasi hasil pelaksanaan SKPD tahun sebelumnya dan rencana kerja, pendanaan, program dan sasaran pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2019 dan merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Kota Palangka Raya selama satu tahun ke depan. Rencana Kerja SKPD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

Dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, dokumen ini menjadi arah dan pedoman yang akan digunakan dalam penyusunan program, kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019 untuk mencapai tujuan dan sasaran sangat tergantung pada sikap/*attitude* dan mental dari penyelenggara program dan kegiatan. Sehingga perlu adanya kerja keras, semangat, tekad yang kuat agar program/kegiatan yang direncanakan berhasil maksimal dan mencapai target yang ditetapkan.

Semoga pada tahun 2019, program dan kegiatan yang ada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, petani, nelayan, pembudidaya, swasta, dan *stakeholder* lainnya secara adil, proposional dan merata.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
JI. G. OBOS XI (LINGKAR DALAM) NOMOR TELP. / FAX (0536) 3231987
PALANGKARAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : /Sekt.-3/SK/VII/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penyusunan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2019 agar sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2019 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.
- b. bahwa Nama - nama yang ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2019 dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701) ;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008 - 2028;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9) ;
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN TIM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SOPD) PERUBAHAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019.**

KESATU : RENJA (Rencana Kerja) Perubahan - SOPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

KEDUA : RENJA (Rencana Kerja) Perubahan - SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SOPD) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2019.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Juli 2019

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA PALANGKA RAYA,**

**Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 020**

Lampiran : I

Nomor : /SK/DKPP/VII/2019

Tanggal : Juli 2019

Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Rencana Kerja
(RENJA)Perubahan Anggaran Tahun 2019

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1.	Ir. HARRY MAIHADI NIP. 19630504 199303 1 020	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Ketua	
2.	M. REIZA INDRAWAN, SP., MMA NIP.19831216 201001 1 005	Penata TK I (III/d)	JFU Subbag Perencanaan	Anggota	
3.	NINUNG HAWINY, S.Hut NIP. 19800719 200801 2 022	Penata (III/c)	JFU Subbag Perencanaan	Anggota	
4.	SADAT, SH	Tenaga Kontrak	JFU Subbag Perencanaan	Anggota	

Palangka Raya, Juli 2019

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA PALANGKA RAYA,**

**Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 020**

Lampiran : II
Nomor : /SK/DKPP/VII/2019
Tanggal : Juli 2019
Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan
Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan
Tahun Anggaran 2019
Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
Kota Palangka Raya

**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
ANGGARAN TAHUN 2019 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

No.	NAMA/NIP	RINCIAN	BESARAN (Rp.)
1.	Ir. HARRY MAIHADI NIP. 19630504 199303 1 020	1 Orang x 6 Bulan x @Rp. 500.000,-	3.000.000,-
2.	Ir. TARANATHA EVANDY NIP.19680612 199403 1 013	1 Orang x 6 Bulan x @Rp. 500.000,-	3.000.000,-
3.	M. REIZA INDRAWAN, SP., MMA NIP.19831216 201001 1 005	1 Orang x 6 Bulan x @Rp. 500.000,-	3.000.000,-
4.	NINUNG HAWINY, S.Hut NIP. 19800719 200801 2 022	1 Orang x 6 Bulan x @Rp. 500.000,-	3.000.000,-
5.	SADAT, SH	1 Orang x 6 Bulan x @Rp. 500.000,-	3.000.000,-

Palangka Raya, Juli 2019

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA PALANGKA RAYA,**

Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 020

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Terwujudnya Kesejahteraan Petani	1. Nilai Tukar Petani	104,75	104,78	104,78	104,78	104,78
			2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,10	90,20	90,40	90,60	90,80
			3. Produktivitas Tanaman Pangan/ Padi (ton/ha)	2,56	2,58	2,58	2,58	2,58
			4. Populasi Ternak Sapi (ekor)	2.118	2.203	2.290	2.406	2.525
			5. Produksi Daging Sapi (ton)	1.157,3	1.215,2	1.275,9	1.339,7	1.406,7
			6. Produksi Sektor Perkebunan/ Kelapa sawit (ton/ha)	1.125,4	63.282	63.282	63.500	63.505
			7. Persentase Kelompok Tani yang Dibina	75%	80%	85%	90%	95%
			8. Vaksin Hewan/ Rabies	6.500 Dosis	7.000 Dosis	7.500 Dosis	8.000 Dosis	8.500 Dosis
			9. Surveillance Avian Influenza	600 Sampel	625 Sampel	650 Sampel	675 Sampel	700 Sampel
			10. Sampel Produk Asal Ternak (sampel)	150 Sampel	175 Sampel	200 Sampel	225 Sampel	250 Sampel

Tabel 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KOTA PALANGKA RAYA

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PALANGKA RAYA

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/D Tahun lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi TRW II 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (TRW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d trw II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100	295.000.000	81	176.604.029	100	288.900.000	17,15	110.824.159	8,62	8,62	98,56	287.428.188,00	10,01	10,03	DKPP	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya pelaksanaan penatausahaan administrasi	100	24.000.000	69	11.465.240	100	20.000.000	12,00	3.735.000	8,81	8,81	81,07	15.200.240,00	10,19	10,37	DKPP	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan penatausahaan administrasi	100	1.360.000.000	94	760.289.328	100	1.303.972.000	7,85	331.218.095	8,75	8,75	101,36	1.091.507.423,00	9,99	10,20	DKPP	
		Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	terpenuhinya kebutuhan peralatan	100	21.000.000	100	17.047.500	100	18.358.500	27,59	10.661.500	8,42	8,42	127,59	27.709.000,00	9,72	9,68	DKPP	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100	58.000.000	99	75.173.650	100	50.724.200	100,00	27.580.175	8,46	8,46	198,68	102.753.825,00	9,01	9,23	DKPP	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100	27.000.000	97	26.125.000	100	27.025.000	25,67	12.005.500,00	8,56	8,56	122,34	38.130.500,00	9,78	9,59	DKPP	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya alat listrik dan elektro	100	-	100	4.075.000	100	-	-	-	-	-	-	4.075.000,00	-	-	DKPP	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	18.000.000	100	15.000.000	100	15.840.000	16,67	6.600.000	8,58	8,58	116,67	21.600.000,00	9,83	9,80	DKPP	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	Terlaksananya koordinasi dan	100	466.728.665	99,54	199.078.974	100	453.066.325	17,14	138.953.324	8,69	8,69	116,68	338.032.298,00	9,83	10,28	DKPP	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam	100	51.000.000	97	18.075.000	100	40.000.000	4,00	15.475.000	8,61	8,61	101,05	33.550.000,00	9,99	10,34	DKPP	
		Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah	Tersedianya Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah	100	24.000.000	38	7.500.000	100	20.000.000	-	-	9,00	9,00	37,50	7.500.000,00	10,63	10,69	DKPP	
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
		Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	100	500.000.000	97,21	245.450.000	100	325.500.000	12,24	39.850.000	8,88	8,88	109,45	285.300.000,00	9,91	10,43	DKPP	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor BPPKP dan BPPPK kota	100	437.124.875	99,90	311.185.000	100	236.870.000	8,75	25.415.000	8,89	8,89	108,65	336.600.000,00	9,91	10,23	DKPP	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan	100	250.000.000	94,44	114.792.700	100	122.044.800	1,03	26.706.600	8,78	8,78	95,47	141.499.300,00	10,05	10,43	DKPP	
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai DP4KP	100	92.000.000	0	0	100	56.700.000	-	-	9,00	9,00	-	-	11,00	11,00	DKPP	
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKP s/D Tahun lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi TRW II 2019	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (TRW II)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d trw II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9-8/7 x 100 %	10= 6+8	11-10/5x100%	12	13
				K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas selama 1 tahun	100 135.000.000	57,65 11.760.000	100 120.000.000	- -	9,00 9,00	57,65 11.760.000,00	10,42 10,91	DKPP	
		V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
		- Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Penyusunan RKA, DPA, DPPA, Laporan Keuangan dll	100 40.000.000	57,65 127.518.000	100 28.175.000	88,94 25.058.000,00	8,11 8,11	146,59 152.576.000,00	9,53 7,19	DKPP	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100 40.000.000	57,65 274.407.310	100 29.987.000	88,94 16.765.000,00	8,44 8,44	146,59 291.172.310,00	9,53 3,72	DKPP	
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Penyusunan Inventarisasi Barang/Aset milik	100 60.000.000	57,65 51.250.957	100 7.650.000	55,91 7.115.000,00	8,86 8,86	113,56 11.760.000	9,86 10,80	DKPP	
		URUSAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										
		VI Program Peningkatan Kesejahteraan Petani										
		Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan	Failitasi Operasional bagi Penyuluh									DKPP
		VII Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)										
		Pengelolaan dan Pendampingan Kegiatan PLA	Terfasilitasinya Kegiatan Penggilingan Padi	1 Tahun	0	1 Tahun	- -	- -	- -	11,00 -	DKPP	
		Pembuatan Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung Pengendalian Inflasi	Tersedianya Tanaman Cabe	1 Tahun	0	1 Tahun	- -	- -	- -	11,00 -	DKPP	
		VII Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan										
		Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	100 400.000.000	99,2 86.366.700	100 87.710.000	59,7 52.365.000	8,40 8,40	158,90 138.731.700,00	9,41 10,65	DKPP	
		Pengelolaan dan pengendalian Organisme pengganggu Tumbuhan	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian	100 150.000.000	0 0	100 71.200.000	73,81 52.552.500,00	8,26 8,26	73,81 52.552.500,00	10,26 10,65	DKPP	
		Penguatan Kelembagaan UPT BBPP Tangkiling	Terlaksananya Kegiatan UPT BBPP	100 350.000.000	98 13.250.000	100 14.697.500	42,19 6.200.700,00	8,58 8,58	139,98 19.450.700,00	9,60 10,94	DKPP	
		Pengembangan Tanaman Cabe Merah dan Bawang Merah Ramah lingkungan	Tersedianya Benih Cabe Merah sebanyak 45 Pcs serta Bibit	100 100.000.000	0 0	0 -	- -	- -	- -	11,00 11,00	DKPP	
		Bantuan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung PM2L	Tersalurnya Bibit Tanaman Cabe siap panen di Lokasi PM2L	100 100.000.000	0 0	0 -	- -	- -	- -	11,00 11,00	DKPP	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKP s/D Tahun lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi TRW II 2019	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (TRW II)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d trw II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9-8/7 x 100 %	10= 6+8	11-10/5x100%	12	13
				K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.
		Perbanyak Bibit Tanaman Hortikultura	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	100 150.000.000	99,91 147.051.750	0 -	- -	- -	99,91 147.051.750,00	10,00 10,02	DKPP	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Tersedianya Sarana dan Prasarana	100 567.640.275	96,15 1.132.509.800	100 1.645.263.000	- -	- -	96,15 1.132.509.800,00	10,04 9,00	DKPP	
		Pengelolaan kebun Inti Hortikultura Kalamangan	Terfasilitasinya Kegiatan Pertanian di Kebun Inti	0 0	0 0	0 -	- -	- -	- -	- -	DKPP	
		Road Map Komoditi Unggulan Tanaman Hortikultura	Informasi Penyebaran dan Potensi Tanaman Hortikultura Bermanfaat sebagai Bahan Informasi dalam Merencanakan Kegiatan yang Berkaitan dengan	0 0	0 0	0 -	- -	- -	- -	- -	DKPP	
		Peningkatan Keterampilan Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Meningkatnya Produksi Pertanian	100 100.000.000	0 0	100 16.400.000	- -	9,00 9,00	- -	11,00 11,00	DKPP	
		Pembinaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pupuk	100 100.000.000	99,53 31.649.500	100 12.425.000	44,06 5.475.000	8,56 8,56	143,59 37.124.500,00	9,56 10,63	DKPP	
		Peningkatan SDM Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terbinanya SDM dan Petugas	100 100.000.000	99,55 80.831.725	100 15.025.000	34,18 5.135.000	8,66 8,66	133,73 85.966.725,00	9,66 10,14	DKPP	
		III URUSAN BIDANG PERKEBUNAN										
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani										
		Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman Karet	Peningkatan Keterampilan Petani/Perkebunan	100 150.000.000	0 0	100 15.575.000	87 13.490.000	8,13 8,13	86,61 13.490.000,00	10,13 10,91	DKPP	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan										
		Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Tersedianya Informasi Pasar	100 150.000.000	0 0	100 29.000.000	53 15.400.000	8,47 8,47	53,10 15.400.000,00	10,47 10,90	DKPP	
		Penyusunan Data Statistik Perkebunan	Tersedianya Data Statistik Perkebunan	100 150.000.000	0 0	100 22.000.000	15 3.375.000	8,85 8,85	15,34 3.375.000,00	10,85 10,98	DKPP	
		Pembinaan ,Pengawasan dan Temu Teknis Bidang Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan ,Pengawasan dan Temu	100 150.000.000	0 0	100 14.000.000	31 4.325.000	8,69 8,69	30,89 4.325.000,00	10,69 10,97	DKPP	
		IX Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan										
		Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar	Terlaksananya Geber-MLT di Wilayah Kota Palangka Raya	100 0	0 0	100 -	- -	- -	- -	11,00 -	DKPP	
		Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung	Terlaksananya Program PM2L di Wilayah Kota	100 150.000.000	0 0	100 -	- -	- -	- -	11,00 11,00	DKPP	
		Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan untuk		100 100.000.000	0 0	100 -	- -	- -	- -	11,00 -	DKPP	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/D Tahun lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi TRW II 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (TRW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d trw II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9-8/7 x 100 %		10= 6+8		11-10/5x100%		12	13	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			Pengawasan Peredaran Pembenhian Komoditi Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan Perbenihan, komoditi Perkebunan	100	100.000.000	0	0	100	-	-	-	-	-	-	11,00	-	DKPP		
			Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakat	Terlaksananya Bantuan Pemeliharaan Kebun	100	100.000.000	0	0	100	58.098.000	56	32.250.000	8,44	8,44	55,51	32.250.000,00	10,44	10,68	DKPP	
			Pengembangan Tanaman Sawit	Tersedianya Tanaman Sampit	100	100.000.000	0	0	100	-	-	-	-	-	-	11,00	-	DKPP		
			X Program Perlindungan Kebun dan Taman																	
			Pemantauan Kebakaran/Gangguan Lahan dan Kebun serta HPT	Tersedianya Data Pantauan Kebakaran dan Gangguan pada lahan/Kebun	100	100.000.000	99,31	117.240.098	100	13.000.000	32	4.160.000	8,68	8,68	131,31	121.400.098,00	9,69	9,79	DKPP	
			Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Meningkatnya Pengetahuan Petani/Pekebun tentang PLTB	100	100.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00	DKPP		
			XI Program Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan																	
			Pemeliharaan Kebun Entres dan Pembibitan Karet	Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Entres dan Pembibitan Karet	100	153.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00	DKPP		
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan																	
			Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah	Terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah	100	100.000.000	99,67	132.898.880	100	35.240.000	27,74	9.775.000	8,72	8,72	127,41	142.673.880,00	9,73	9,57	DKPP	
			Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah	Terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	100	100.000.000	99,67	132.898.880	100	39.600.000	19,77	7.830.000	8,80	8,80	119,44	140.728.880,00	9,81	9,59	DKPP	
			XII URUSAN BIDANG KETAHANAN PANGAN																	
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																	
			Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terlaksananya Nilai Kelas kemampuan Kelompok Tani dan Pelaksanaan Latihan	100	400.000.000	0	0	100	101.680.000	44,87	45.620.000,00	8,55	8,55	44,87	45.620.000,00	10,55	10,89	DKPP	
			Peningkatan Pembinaan di Pos Penyuluhan	Terlaksananya Pembinaan di Pos Penyuluhan	100	400.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00	DKPP		
			Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku agrobisnis	Terlaksananya rebug madya tingkat nasional dan pekan daerah	100	400.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00	DKPP		
			Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian,	100	400.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00	DKPP		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKP s/D Tahun lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi TRW II 2019	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (TRW II)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d trw II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9-8/7 x 100 %	10= 6+8	11-10/5x100%	12	13
				K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	
		Peningkatan Kapasitas BPPPK Kota P. Raya	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian,	100 398.000.000	0 0	0 -	- -	- -	- -	11,00 11,00	DKPP	
		Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) Tingkat Nasional	Meningkatnya Pengetahuan, keterampilan dan sikap petani/pelaku	100 100.000.000	0 0	0 -	- -	- -	- -	11,00 11,00	DKPP	
		XIII Program Peningkatan Ketahanan Pangan										
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Menurunnya jumlah rawan pangan dan gizi	100 100.000.000	100 20.880.000	100 20.880.000	23,46 2.552.500	8,88 8,88	123,46 23.432.500,00	9,77 10,77	DKPP	
		Pemantauan Harga Pangan Pokok	Tersedianya informasi analisis harga pangan	100 96.998.816	99,44 8.950.000	100 13.475.000	29,68 4.000.000	8,70 8,70	129,12 12.950.000,00	9,71 10,87	DKPP	
		Kegiatan Pendukung Dewan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	100 100.000.000	0 0	0 -	- -	- -	- -	11,00 11,00	DKPP	
		Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terbinanya kondisi desa miskin menjadi desamapan melalui	100 103.854.266	99,97 11.127.000	100 5.130.000	21,54 1.105.000	8,78 8,78	121,51 12.232.000,00	9,78 10,88	DKPP	
		Pengembangan Diversifikasi Pangan	Lomba cipta menu berbahan dasar jagung dalam rangka diversifikasi pangan, hari pangan se dunia	100 150.000.000	93,43 35.530.000	100 33.770.000	3,05 1.030.000,00	8,97 8,97	96,48 36.560.000,00	10,04 10,76	DKPP	
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pembinaan dan pengawasan produk pangan dan sosialisasi	100 100.000.000	100 14.000.000	100 8.000.000	9,38 750.000,00	8,91 8,91	109,38 14.750.000,00	9,91 10,85	DKPP	
		Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Tersedianya pangan pokok melalui ketersediaan cadangan	100 100.000.000	99,93 28.174.200	100 9.650.000	56,48 5.450.000,00	8,44 8,44	156,41 33.624.200,00	9,44 10,66	DKPP	
		Analisis dan Pola Konsumsi Pangan	pemantauan konsumsi pangan pelatihan analisis pola konsumsi	100 100.000.000	0 -	0 -	- -	- -	- -	11,00 11,00	DKPP	
		Hari Pangan Sedunia (Tk. Provinsi dan Nasional)	Hari pangan sedunia Tk Provinsi dan Nasional	100 200.000.000	96,95 31.807.000	100 17.672.350	- -	9,00 9,00	96,95 31.807.000,00	10,03 10,84	DKPP	
		Sosialisasi P2KP	Sosialisasi P2KP	100 100.000.000	0 0	0 -	- -	- -	- -	11,00 11,00	DKPP	
		Pameran dan Promosi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Pameran dan Promosi Dalam dan Luar Daerah	100 200.000.000	100 37.214.100	100 46.375.000	- -	9,00 9,00	100,00 37.214.100,00	10,00 10,81	DKPP	
		Pengembangan Lahan Pekarangan	Pengadaan bibit tanaman pekarangan	100 100.000.000	0 0	0 -	- -	- -	- -	11,00 11,00	DKPP	
		Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	Neraca Bahan Makanan	100 100.000.000	100 1.320.000	100 6.132.000	24 1.460.000	8,76 8,76	123,81 2.780.000,00	9,76 10,97	DKPP	
		Pendampingan P2KP	Terlaksananya Kegiatan P2KP	100 100.000.000	100 2.000.000	100 2.085.000	88,01 1.835.000	8,12 8,12	188,01 3.835.000,00	9,12 10,96	DKPP	
		Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan	Informasi tentang stok Pangan Beras di	100 100000000	99,81 32438114	100 11.300.000	20,35 2.300.000,00	8,80 8,80	120,16 34.738.114,00	9,80 10,65	DKPP	
		XIV Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/Perkebunan Lembangan										
		Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian perkebunan	Failitasi Operasional bagi Penyuluh	100 400.000.000	99,83 42.926.400	100 36.130.000	23,17 14.765.000,00	8,59 8,59	123,00 57.691.400,00	9,77 10,86	DKPP	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/D Tahun lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi TRW II 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (TRW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d trw II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9-8/7 x 100 %		10= 6+8		11-10/5x100%		12	13	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi	100	100.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00	DKPP		
			Pelaksanaan Metode Penyuluhan/Perkebunan	Terlaksananya percontohan di lahan perkebunan	100	100.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00	DKPP		
			Bimbingan Teknis Penyuluhan	Terlaksananya Bimbingan teknis	100	100.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00	DKPP		
			Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis	Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis	100	100.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00	DKPP		
			Optimalisasi Penyuluhan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Palangka Raya	Pemberdayaan Petani dalam Peningkatan Pengembangan Ekonomi Lokal	100	100.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00	DKPP		
			Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Tercapainya Penilaian Kinerja Penyuluh	100	100.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00	DKPP		
			Kegiatan Penilaian Angka Kredit	Tercapainya Penilaian Angka Kredit Bagi Penyuluh PNS	100	100.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00	DKPP		
			XV Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak																	
			Penanggulangan Rabies	Hewan Tervaksin bebas Penyakit Rabies	100	250.000.000	98,93	255.733.699	100	198.750.000	7,85	15.600.000	8,92	8,92	106,78	271.333.699,00	9,93	9,91	DKPP	
			Surveilance Penyakit Avian Influenza	Terdeteksi secara Dini Penyakit AI	100	221.056.875	100	34.087.500	100	25.000.000	94,46	23.615.500	8,06	8,06	194,46	57.703.000,00	9,06	10,74	DKPP	
			Pengawasan Produk Asal Ternak	Tersedianya Produk asal Ternak yang Asuh	100	100.000.000	99,5	75.001.416	100	35.000.000	59,86	20.950.000	8,40	8,40	159,36	95.951.416,00	9,41	10,04	DKPP	
			Pengadaan Sarpras Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100	100.000.000	97,67	97.493.500	100	20.000.000	7,88	1.575.000	8,92	8,92	105,55	99.068.500,00	9,94	10,01	DKPP	
			XVI Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan																	
			1. Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan	Tersedianya Informasi pasar hasil produksi peternakan	100	100.000.000	0	-	100	22.000.000	15,57	3.425.000	8,84	8,84	15,57	99.068.500,00	9,94	10,01	DKPP	
			XVII Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan																	
			Pengadaan dan Pendistribusian Saprasi Teknologi Peternakan Tepat Guna	Terlaksananya Inseminasi Buatan dan Distribusi Saprasi Peternakan	100	100.000.000	97	173.065.137	100	76.600.000	1,93	18.525.000,00	8,76	8,76	98,93	191.590.137,00	10,01	9,08	DKPP	
			XVIII Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan																	
			Penyuluhan Pengolahan Bibit Ternak yang didistribusikan kepada	Peningkatan Populasi Ternak sebagai akibat Peningkatan	100	100.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00	DKPP		
			Pengembangan Pakan Ternak	Terlaksananya Penyediaan Hijauan	100	386.110.000	98,89	432.738.000	100	173.400.000	80,39	139.400.000	8,20	8,20	179,28	572.138.000,00	9,21	9,52	DKPP	
			Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	Peningkatan Populasi Ternak Masyarakat	100	449.150.000	0	0	100	151.000.000	88,05	132.950.000	8,12	8,12	88,05	132.950.000,00	10,12	10,70	DKPP	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan	Berkembangnya Kawasan Peternakan	100	650.677.500	96,01	1.084.206.249	100	395.000.000	3,99	40.995.500	8,90	8,90	100,00	1.125.201.749	10,00	9,27	DKPP	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi TRW II 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (TRW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d trw II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9-8/7 x 100 %		10= 6+8		11-10/5x100%		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ternak	100	200.000.000	94,27	71.647.477	100	38.000.000	78,62	29.874.000	8,21	8,21	172,89	101.521.477,00	9,27	10,49	DKPP	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT - RPH	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan UPT RPH	100	200.000.000	98,92	505.456.763	100	350.900.000	14,21	49.872.463	8,86	8,86	113,13	555.329.226,00	9,87	8,22	DKPP	

Palangka Raya,

Juli 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PALANGKA RAYA,

Ir. HARRY MAIHADI

Pembina Utama Muda

19630504 199303 1 020